



LAPORAN BULANAN BP3OKP PAPUA SELATAN

SEPTEMBER 2025



OLEH:
TIM BP3OKP PAPUA SELATAN





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan September 2025 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selama bulan September 2025, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan.

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan, serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif.

Merauke 10 Oktober 2025

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd.,MRSC

NIP: 999920240117145257



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan	1
1.1.1 Maksud	1
1.1.2 Tujuan	1
1.2 Ringkasan Kelembagaan	1
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	1
1.2.2 Definisi	2
1.2.3 Struktur Kelembagaan	3
1.2.4 Tugas dan Fungsi.....	3
1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan.....	4
1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan	5
1.2.7 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan.....	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN	8
2.1 Rekapitulasi Kegiatan.....	8
2.2 Capaian	42
BAB III PENUTUP	46
3.1 Kesimpulan.....	46
3.2 Rencana Tindak Lanjut Bulan Oktober 2025	47
3.3 Penutup	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022 3



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar SDM sesuai struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan	5
Tabel 1. 2 Daftar sarana & prasarana pada sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan.....	6
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Kegiatan BP3OKP Bulan September 2025.....	8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Maksud dari laporan bulanan ini disusun agar mempermudah Anggota BP3OKP dan POKJA dalam menginventarisir kegiatan Program Kerja yang tersusun dalam kalender tahunan dan rencana kegiatan setiap bulannya yang telah dilaksanakan dan juga menginventarisir pemenuhan kegiatan yang bersumber dari kegiatan kemitraan Anggota BPP dan POKJA BPP-PPS.

1.1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaporan bulanan dari Anggota BPP dan Kelompok Kerja Papua Badan Pengarah Propinsi Papua Selatan, adalah :

1. Menyajikan catatan kegiatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK dalam bulan berjalan.
2. Mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK BPP PPS.
3. Memberikan masukan strategis untuk penguatan koordinasi lintas OPD dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.



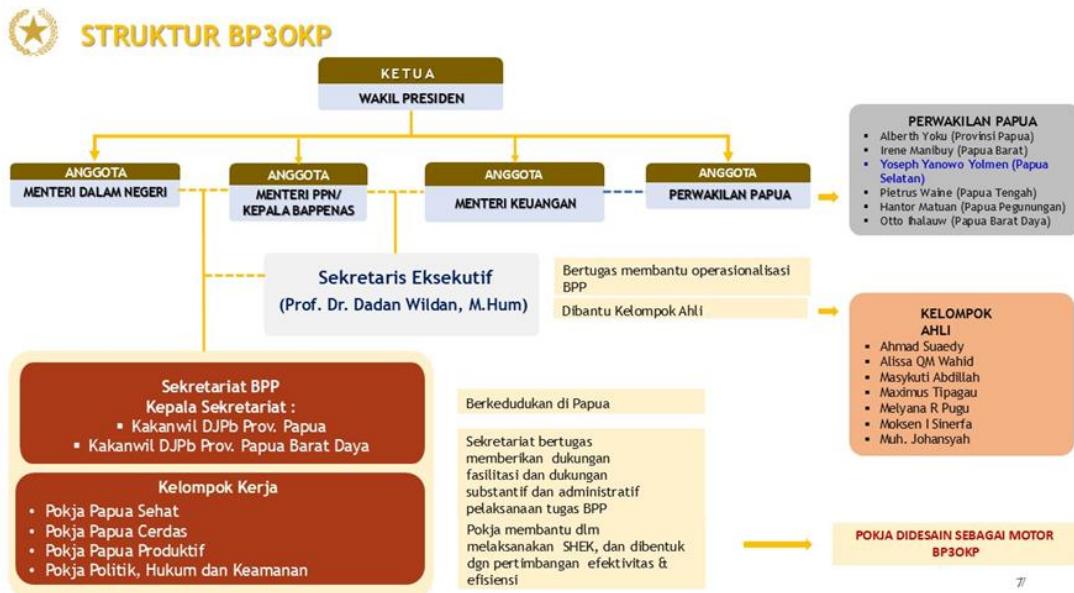
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
- 5) Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- 6) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
- 7) Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.



1.2.3 Struktur Kelembagaan



Gambar 1. 1 Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022

1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;



- d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan\ pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Anggota BPP beserta Pokja BPP PPS dalam pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan pelaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara general, sebagai berikut :

a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan

- Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah terkait Otsus.
- Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

b. Harmonisasi Data dan Informasi

- Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program

- Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..

d. Koordinasi Internal dan Eksternal

- Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai



rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..

e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan dan keberlanjutan program.

f. Pelaporan dan Transparansi

- Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan.
- Menyebarluaskan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara berkala dan terbuka.

1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1, di bawah :

Tabel 1. 1 Daftar SDM sesuai struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

NO.	UNIT KERJA & JABATAN	JLH ORG
1.	Pimpinan : Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan	1 org
2.	Kelompok Kerja (POKJA) : 1. POKJA Papua Sehat : 2. POKJA Papua Cerdas : 3. POKJA Papua Produktif : 4. POKJA Papua Polhukam	1 org 1 org 1 org - org
3.	Pendukung Administratif : TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke Provinsin Papua Salatan dan substantif	5 org
4.	Staf/ Karyawan : Staf/karyawan yang diperbantukan kepada BP3OKP yaitu karyawan PPNP PN	3 org



1.2.7 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP, tersedia sarana dan prasarana utama pada skretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, diantaranya dapat dilihat pada Tabel 1. 2 Di bawah.

Tabel 1. 2 Daftar sarana & prasarana pada sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

NO.	URAIAN	SAT	VOL
1.	Bangunan Kantor	gdg	1
2.	Ruangan		
1)	Front office	Ruang	1
2)	Ruang Rapat	Ruang	1
3)	Ruang Tamu	Ruang	1
4)	Ruang Kerja Pimpinan/ Anggota BP3OKP PPS	Ruang	1
5)	Ruang kerja Anggota POKJA dan Staff	Ruang	1
6)	Ruang Dapur	Riang	1
7)	Kamar Mandi ^ Toilet	Ruang	1
3.	Peralatan dan Perlengkapan		
1)	Meja dan Kursi Kerja Pimpinan (3 kursi + 1 set meja)	set	1
2)	Meja dan kursi sofa ruang pimpinan	set	1
3)	Meja dan kursi sofa ruang tamu	set	1
4)	Meja Anggota POKJA dan Staf	unit	1
5)	Kursi POKJA dan Staf	unit	6
6)	Meja dan kursi Front Office	set	1
7)	Smart TV	unit	2
8)	TIK Satlink (digunakan bersama)	unit	1
9)	Laptop	unit	4
10)	Printer (Tidak bisa digunakan)	unit	1
11)	Hardisk Eksternal 1 TB	unit	1
12)	Kitchen set	Set	1
13)	Kulkas	unit	1
14)	Dispenser	Unit	1



NO.	URAIAN	SAT	VOL
15)	Kompor Listrik	unit	1
16)	ATK	tersedia	
17)	Peralatan Makan	tersedia	



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Anggota BPP, Pokja Papua Cerdas, Pokja Sehat dan Pokja Produktif pada bulan September terurai pada Tabel 2. 1 berikut.

Tabel 2. 1. Rekapitulasi Kegiatan BP3OKP Bulan September 2025

Kegiatan 1		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Dasar Pelaksanaan		Hari/Tgl: Kamis, 04 September 2025
Kegiatan		<input checked="" type="checkbox"/> Menghadiri kegiatan audiensi Bersama pihak Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tanggal 4 September 2025
Perintah Kerja	:	Surat Tugas Nomor. ST-148/SETBPP/JYP/2025
Lokasi Kegiatan	:	Ruang Rapat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polkam di Jakarta
Judul Kegiatan	:	Audiensi Bersama pihak Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua
Pelaksana Kegiatan	:	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">○ Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan○ Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC○ Albert Yoku, S.Ag.○ Drs. Otto Ihalauw, M.A.○ Irene Manibuy, S.H., M.Kn.○ KBP (Purn) Drs. AJB Maturbongs, SH
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Untuk melaksanakan tugas menghadiri kegiatan audiensi bersama pihak Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.



- Hasil Kegiatan :
1. Enam Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari masing-masing Provinsi sepakat mengusulkan RAPAT PLENO bersama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.
 2. BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan (Yoseph Y. Yolmen) mengusulkan agar dilakukan segera Promosi Perdamaian dengan melibatkan BP3OKP untuk mempublikasikan dan mempromosikan Perkembangan Pembangunan yang terjadi di Provinsi Papua mulai dari Merauke – Sorong terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kreatif dan POLHUKAM terutama kepada Negara-negara tempat pergerakan Kelompok Separatis tinggal untuk mengerti, mengetahui dan memahami kondisi Real Pembangunan di Enam (6) Provinsi Papua.
 3. Rapat Koordinasi untuk seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, BP3OKP, DPRP, DPRK dan MRP se-Tanah Papua segera dilaksanakan follow up hasil Meeting Enam Anggota BP3OKP bersama Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri tgl. 24 Juni 2025 di Kantor Menteri Dalam Negeri, karena momen ini sangat penting untuk mendiskusikan tentang pentingnya Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Koordinasi Kelembagaan antara Daerah dan Pusat untuk terjadinya suatu lompatan Pembangunan Papua untuk Lima (5) Tahun ke depan dengan mangacu pada RIPPP, RAPPP, dan SIPPP agar seluruh Pejabat Papua memiliki Konsep dan Energi membangun Papua yang sama.
 4. Masyarakat Papua Selatan menyambut Berkat Hadirnya Project Strategis Nasional (PSN) dengan sangat baik, tetapi dengan berjalannya Project ini ada beberapa hal Strategis yang BP3OKP melihat sangat perlu dan segera mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Tenaga Kerja, dan inisiatif dari Anggota BP3OKP Provinsi Papua Selatan sudah



mengirimkan Surat Audiensi beberapa kali kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja tetapi kami belum mendapat arahan untuk waktu Audiensi dari Bapak Menteri Tenaga Kerja, dan kami berharap pada saat Audiensi itu kami akan menyampaikan beberapa konsen strategis, terutama:

- a) Pendirian Sekolah Vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK sangat penting dan segera harus dibangun untuk menyiapkan Pendidikan Vokasi bagi Adik-adik OAP dan NonOAP yang Terampil karena mereka ini akan dididik, dan dibekali Ketrampilan-ketrampilan khusus, seperti: Mekanik, Elektrik, Elektro, Driver Alat-alat berat (Forklift; Beko, Jonder, dll).

- b) Membuka Workshop dan Spare di Merauke.
- c) Mendidik anak-anak Papua Selatan di Sekolah Vokasi itu untuk menjadi anak-anak yang Disiplin, Mandiri, Terampil, Berdedikasi Tinggi dan memiliki Daya Saing Tinggi.

5. Lembaga Masyarakat Adat di Papua harus segera di Benahi kedepan untuk menghindari konflik internal karena ada LMA versi A, atau B. LMA ditingkat Provinsi dan Kabupaten kami usulkan hanya diperbolehkan Satu, dan diusulkan tidak terjadi dualisme Lembaga Masyarakat Adat (LMA)
6. Kami mengusulkan dengan Program Presiden dan Wakil Presiden untuk Pembangunan Tiga Juta Rumah, kiranya dapat diberikan bagi Tokoh lintas Agama sesuai janji Bapak Wakil Presiden sebelumnya sudah disepakati akan dibangun Total 100 Unit Rumah di Provinsi Papua Selatan bagi Tokoh Agama, kiranya Bapak Deputi dapat menyampaikan kepada Bapak Menko Polkam untuk mengkoordinasikan kepada Bapak Menteri Perumahan untuk memperhatikan Usulan Pembangunan Rumah bagi Tokoh Agama : ISLAM, KATHOLIK, PROTESTAN, HINDU dan BUDHA. Lahan



bersertifikat sudah disiapkan untuk Pembangunan Perumahan yang akan dibangun di Merauke ini.

7. Kami mengusulkan Gedung Olah Raga (GOR) dapat difasilitasi dengan Dana APBN untuk dibangun tempat Pendidikan bagi Calon-calon Atletik Hebat dari Provinsi Papua Selatan terutama di Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel. Dampak positif dibangunnya sebuah GOR ini sangat penting untuk mendidik Atlet Hebat Berprestasi yang Berkarakter, Disiplin, Jiwa Kompetitif yang tinggi dan Mentalitas Juang yang Tinggi, sehingga Generasi muda Papua Selatan dapat dijauhkan dan tidak terjebak dengan issue-issue Negatif, seperti: Mabuk-mabukan, Ganja, Lem Aibon, dan Perkelahian antar Pemuda.
8. PSU Boven Digoel. Saran dan usul kami sebagai Anggota BP3OKP agar MK tidak memberikan ruang untuk terjadinya PSU tahap kedua, sebaiknya siapapun PASLON yang meraup Suara Terbanyak segera diSAH kan dan di Lantik, dan apabila diberikan ruang untuk PSU tahap kedua Resikonya sangat besar untuk terjadi Konflik antar warga pendukung Paslon di Kabupaten Boven Digoel. Hasil Analisis kami di Lapangan akan terjadi Potensi yaitu:
 - a) Ada Potensi Konflik Perang Suku antara pendukung Paslon 03 dengan Paslon lain akan terjadi
 - b) Pemborosan Penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua Selatan sangat besar, seharusnya Anggaran itu dapat digunakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Boven Digoel
 - c) Roda Pemerintah sangat terganggu selama Tiga (3) Tahun terakhir, termasuk pembangunan di Boven Digoel sangat Vakum dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian tidak berjalan efektif sesuai hasil evaluasi dan kunjungan BP3OKP.



Dokumentasi :



Kegiatan 2		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Dasar Pelaksanaan		Hari/Tgl: Jumat, 05 September 2025
Kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025 Undangan Bupati Kab. Mappi No. 000.7.3/1085/ BUP/IX/2025; Kepi, 1 September 2025
Lokasi Kegiatan	:	Gedung Negara Provinsi Papua Selatan
Judul Kegiatan	:	Audiensi Pemerintah Kabupaten Mappi bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas dna Papua Sehat
Tugas dan Fungsi	:	Koordinasi dan sinkronisasi program prioritas Kabupaten Mappi dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua Selatan, khususnya pada empat pilar pembangunan
Pelaksana Kegiatan	:	Pemerintah Kabupaten Mappi dan Pemerintah Provinsi Papua
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">○ Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi (Bupati, Wakil Bupati beserta jajaran OPD)○ Gubernur Papua Selatan beserta jajaran Pemprov Papua Selatan○ Ketua MRP Provinsi Papua Selatan○ Perwakilan DPR Kaupaten Mappi○ Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas



Tujuan Pelaksanaan Kegiatan : Untuk memaparkan Program Percepatan Pembangunan Terpadu, Terintegrasi, dan BerkelaJutan Kabupaten Mappi Tahun 2026–2030 yang berfokus pada empat pilar utama: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ekonomi, sebagai bagian dari strategi mendorong pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelaJutan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.

Hasil Kegiatan : 1. Pemda Kabupaten Mappi memaparkan konsep percepatan pembangunan terintegrasi 2026–2030 berbasis empat pilar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi).
2. Disampaikan kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Mappi dan Puskesmas, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan, peralatan medis, serta kebutuhan pembangunan RS Tipe D Pratama.
3. Pemda Mappi menekankan perlunya dukungan Pemprov Papua Selatan dan Pemerintah Pusat untuk membantu pendanaan program prioritas.
4. BP3OKP menegaskan pentingnya sinkronisasi program Pemda Mappi dengan RIPPP dan RPJMD Provinsi Papua Selatan 2025–2029
5. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyampaikan bahwa dukungan bagi Kabupaten Mappi telah diberikan sesuai kewenangan PP 106 tahun 2021

Rekomendasi/ Rencana :

- Penyelarasan program prioritas Kabupaten Mappi dengan RPJMD Provinsi Papua Selatan dan RIPPP.
- Mendorong Pemda Mappi mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan (Dana Otsus, APBD, DAK, dan sumber pusat lainnya) untuk memperkuat realisasi program prioritas.

Tindaklanjut



Dokumentasi :



Kegiatan 3		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Hari/Tgl:		Selasa, 09 September 2025
Lokasi Kegiatan	:	Kantor Inspektorat Provinsi Papua Selatan
Judul Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Pembaahan Temuan BPKP Tahun 2024-Provinsi Papua Selatan
Misi/Keterangan	:	Pokja Sehat
Tugas dan Fungsi	:	Koordinasi, evaluasi, dan penyelarasan tindak lanjut temuan yang dilaksanakan BPKP Tahun 2024 Provinsi Papua Selatan.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">○ BP3OKP Papua Selatan (Pokja Papua Sehat)○ Inspektorat Provinsi Papua Selatan○ Perwakilan BPKP Papua
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKP terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan program strategis Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2024.
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat saldo temuan BPKP tahun 2024 yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD terkait.2. Diperlukan penguatan koordinasi antara BP3OKP, Pemprov, dan BPKP agar rekomendasi hasil audit dapat segera ditindaklanjuti



3. Penekanan agar Gubernur Papua Selatan melalui OPD melakukan percepatan penyesuaian program dengan mandat RIPPP.

Rekomendasi :	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penyesuaian dan sinkronisasi hasil temuan BPKP dengan dokumen perencanaan daerah2. BP3OKP Papua Selatan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindak lanjuti hasil temuan BPK
---------------	---

Dokumentasi :



Kegiatan 4	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	Hari/Tgl: Rabu, 10 September 2025
Lokasi Kegiatan	: Kantor BP3OKP Papua Selatan, Merauke
Judul Kegiatan	: Kunjungan Korwas BPKP Provinsi Papua bersama Kepala Inspektorat Provinsi Papua Selatan ke Kantor BP3OKP Papua Selatan
Misi/Keterangan	: Anggota BPP beserta tim Pokja
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	: Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan Koordinasi, evaluasi kinerja, serta penguatan sinergi antara BP3OKP Papua Selatan, Inspektorat, dan BPKP terkait temuan dan tindak lanjut pengelolaan Dana Otsus pemerintah provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none">○ Korwas BPKP Provinsi Papua○ Kepala Inspektorat Provinsi Papua Selatan○ Anggota BP3OKP Papua Selatan



- Pokja Papua Sehat
- Pokja Papua Cerdas
- Sekretariat BPP di Merauke

Tujuan Kegiatan	Pelaksanaan :	Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi 5 September 2025 di Inspektorat, kegiatan ini bertujuan memperdalam pembahasan temuan BPKP tahun 2024 di provinsi Papua Selatan dan memperkuat evaluasi kinerja BP3OKP Papua Selatan dalam koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat temuan bahwa kinerja BP3OKP Papua Selatan masih belum sepenuhnya optimal berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Papua Selatan.2. BPKP menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan komunikasi agar fungsi BP3OKP sebagai orkestrator pembangunan Otsus dapat berjalan optimal.3. Inspektorat menyampaikan kesiapan untuk berkoordinasi bersama BP3OKP dalam tindak lanjut temuan audit BPKP, dengan menekankan peran SHEK BP3OKP dalam mengorkestrasi koordinasi dengan Pemda.4. Disepakati perlunya forum rutin antara BP3OKP, Inspektorat, dan OPD di Provinsi Papua Selatan untuk tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
Rekomendasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. BP3OKP Papua Selatan segera menyusun mekanisme koordinasi dengan Pemerintah daerah2. Menyusun timeline tindak lanjut hasil temuan BPKP melalui mekanisme SHEK oleh BP3OKP bersama Inspektorat dan OPD terkait3. Mengintegrasikan hasil audit ke dalam agenda SHEK BP3OKP (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi).



Dokumentasi :



Kegiatan 5	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	Hari/Tgl: Kamis, 11 September 2025
Lokasi Kegiatan	: Kantor BP3OKP Papua Selatan, Merauke
Judul Kegiatan	: Kunjungan Silaturahmi Pangdam XXIV/Mandala Trikora ke BP3OKP Papua Selatan.
Misi/Keterangan	: Anggota BPP beserta tim Pokja (Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Polhukam/Damai).
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	: <ol style="list-style-type: none">Sinkronisasi: Menyatukan program TNI dengan agenda pembangunan RIPPP & Inpres 9/2024.Harmonisasi: Mempererat hubungan TNI, pemerintah, tokoh adat/agama, dan masyarakat.Evaluasi: Mengkaji isu SDM, kesehatan, dan keamanan wilayah.Koordinasi: Menetapkan sinergi berkelanjutan TNI–BP3OKP–Pemda untuk pembangunan aman & damai
Peserta Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none">○ Pangdam XXIV/Mandala Trikora, Mayjen TNI Lucky Avianto, beserta rombongan○ Anggota BP3OKP Papua Selatan○ Pokja Papua Sehat○ Pokja Papua Cerdas
Tujuan Kegiatan	: <p>Pelaksanaan : 1. Menjalin silaturahmi dan memperkuat koordinasi antara TNI dengan BP3OKP Papua Selatan.</p>



2. Mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan, keamanan, dan ketertiban di wilayah Papua Selatan.
3. Mengimplementasikan Inpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang peran TNI dalam mendukung pembangunan daerah.

Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pangdam menegaskan komitmen TNI untuk mendukung pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan2. Disepakati pentingnya sinergi antara BP3OKP, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas wilayah3. Anggota BPP menekankan bahwa peran TNI, Polri, dan BIN dalam Pokja Polhukam sangat strategis untuk mendukung percepatan pembangunan4. TNI siap membantu daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian melalui Babinsa dan Babinkamtibmas yang sudah berperan sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan penyuluhan pertanian5. Tersampaikan aspirasi agar tenaga kerja Orang Asli Papua diberdayakan dalam Program Strategis Nasional (PSN) di Merauke, sehingga masyarakat lokal lebih berperan dalam pembangunan.
----------------	---	--

Dokumentasi :





Kegiatan 6		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Hari/Tgl: Jumat, 12 September 2025 Jam 09.00-14.30 WIT		
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
Lokasi Kegiatan	:	AULA KPPN Merauke
Judul Kegiatan	:	Undangan Rapat SHEK penggunaan dana Otsus pada bidang Pendidikan
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi	:	Sinkronisasi, Harmonisasi Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) yang dilaksanakan
Pelaksana Kegiatan	:	BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan	:	BP3OKP PPS, DPR Provinsi, MRP, Kepala OPD Pendidikan PPS dan 4 Kabupaten, Kapala OPD, Kesra PPS dan 4 Kabupaten, dan Kepala Dinas Sosial PPS dan Pemerhati Pendidikan, PMKRI, HMI, PMII, GMKI.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan dan pengelolaan Dana Otsus pada bidang pendidikan, khususnya Dana Bantuan Studi dan Beasiswa, serta layanan pengembangan pendidikan.
Hasil Kegiatan	:	1. Dinas Pendidikan Propinsi Papua Selatan <ul style="list-style-type: none">a. Belum adanya data terkait Rasio presensi Anggaran dan presentasi siswa yang diberikan beasiswa dari dinas Pendidikan PPSb. Terkait dengan kolaborasi pembiayaan Bantuan Studi Bersama Kesra pada Tingkat Kabupaten sudah dilaksanakan kecuali Kesra Kab. Asmat.c. Pada Tahun 2025 Dinas Pendidikan PPS telah melakukan perekrutan penerima beasiswa untuk studi lanjut pada Prodi Kedokteran Uncen, dan diperoleh 10 orang Siswa OAP, dan diperoleh siswa yang berkualitas dari Kab. Asmat.



-
- d. Perlunya Diskresi Dana Otsus untuk Beasiswa, jangan diintervensi pada tahun 2026, karena dapat berdampak pada dideportasinya 18 mahasiswa yang SL di Luar Negeri akibat terlambatnya pembayaran.
-

2. Ketua Komisi 3 DPRP PPS

- a. Anggaran Beasiswa merupakan salah satu sumber Anggaran yang berpotensi memberikan ruang untuk korupsi jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel.
 - b. Adanya prestasi mahasiswa OAP yang memperoleh beasiswa menjadi ikon di poltekkes karena prestasi yang ditorehkan oleh mereka, namun ada juga yang mengelauh dari awal sampai saat ini.
 - c. Untuk ke depannya dalam pemberian beasiswa, perlu dilakukan proses seleksi termasuk dengan pemeriksaan kejiwaan calon penerima beasiswa sebelum diberangkatkan untuk studi lanjut.
 - d. Adanya kasus 22 orang dikembalikan dari PTN tujuan.
 - e. Adanya Asrama Mahasiswa di Menado tidak bisa direhab karena pemiliknya bukan Pemda Merauke, Dimana pada saat pembelian saat itu menggunakan nama Kepala dinas social.
 - f. Adanya SK pemerintah daerah bagi penerima beasiswa
 - g. Untuk tagihan beasiswa dari PT tidak melalui penerima beasiswa tetapi melalui Pemerintah Daerah, Dimana data tagihan dilengkapi dengan rekam jejak studi mahasiswa yang bersangkutan, seperti Surat Aktif Kuliah, KHS dan Transkrip Nilai.
 - h. Untuk uang harian tetap akan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Dimana sumber Anggaran dari Dana OTSUS dan DAU, untuk OAP Rp. 1.500.000/bln dan Mahasiswa Nusantara Rp.700.000/bln
-



3. Kadis Pendidikan Kabupaten Merauke

- a. Saran pertemuan ini kenapa tidak menghadirkan Baperida. Krena mereka yang mengatur Anggaran.
- b. Sebaran dana Pendidikan dari SG 30% tidak hanya terfokus pada dinas Pendidikan (Kesra, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan Daerah, BKPSDM)
- c. Untuk Kab. Merauke Tahun 2024, 30% Dana Otsus Rp. 76.000.000.000 Dinas Pendidikan diberikan Rp. 34 Milyar dan 42 Milyar tersebar rumpun pendidikan
- d. Tujuan dari syarat salur sebenarnya Adalah untuk mengukur kinerja bukan melemahkan daerah.
- e. BP3OKP untuk mengarahkan Baperida terkait dengan pendistribusian Dana Otsus ke setiap OPD.
- f. Akan adanya penutupan sekolah oleh Dinas Pendidikan bagi sekolah-sekolah yang tidak produktif.
- g. Dinas Pendidikan telah menghadirkan Yayasan-Yayasan terkait pengelolaan satuan Pendidikan dan Ada indikasi Yayasan tidak boleh diatur oleh pemerintah.
- h. Penentuan standar IPK 3 utk melanjutkan perlu mempertimbangkan proses Pendidikan secara berjenjang, sehingga perlu adanya perhatian mulai dari Pendidikan Dasar dasar.
- i. BP3OKP diharapkan dapat mengarahkan Baperida terkait dengan pengelolaan Dana OTSUS, karena ada indikasi perlakuan label Dana Otsus dihilangkan disamakan dengan sumber Dana Lain.
- j. Ada 530 satuan Pendidikan, Inpres mewajibkan PAUD dan akan menambah 531.
- k. Evaluasi penyelenggaran satuan Pendidikan dan akan dilakukan penutupan satuan Pendidikan atau pengalihan satatus satuan Pendidikan
- l. Dengan Jumlah dana otsus yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten sebesar 34 miliar dengan



mengelola kegiatan2 yang sesuai syarat, maka dana tersebut tidak mencukupi.

- m. Perlu adanya atensi BP3OKP dalam pendistribusian Dana Otsus agar Baperida jangan sampai SG 30% hanya $\frac{1}{2}$ yang diberikan kepada dinas Pendidikan.
 - n. Ada 5 kategori guru yang ditangani oleh Dinas Pendidikan 2 yang tercatat yaitu PNS dan P3K sedangkan Honor Sekolah Honor Daerah, Guru Kontrak menjadi beban APBD (DAU dan DO)
 - o. Menjadi Perhatian BP3OKP yaitu untuk 3 kategori Guru tersebut, melalui dukungan Pengajuan Formasi di PAN RB
 - p. Dengan Juknis Dana BOS Tahun 2025 menimbulkan masalah baru, Perlu diperjelas secara detaik
 - q. Untuk saat ini terkait Pendidikan gratis agak sulit karena kebutuhan satuan Pendidikan sangat beragam.
 - r. Sekolah Swasta Kurang lebih 99 sekolah Negeri 112
 - s. Terkait tenaga guru untuk sekolah swasta Sebagian di ajar oleh guru PNS,
 - t. Dengan dasar itu menjadi dasar usulan kepada Menpan untuk penambahan formasi Guru
 - u. Untuk mengurangi angka putus sekolah di Kab Merauke ada PKBM, dengan pembiayaan operasional dari Pusat
 - v. Telah dilakukan evalauasi terhadap PKBM yang tidak operasional, maka dicabut ijinnnya
 - w. Telah dilakukannya penertiban terhadap disiplin PNS guru, dan ada 105 guru mangkir yang telah diberikan sanksi dan pemberhentian dengan semesntara
 - x. Tahun 2025 ada sekian banayak siswa yang tidak bisa naik kelas, SMK N.1 ada sekitar 100 lebih tidak naik kelas, smk n.3 juga sama dan sekolah2 ini penerima dana BOS terbesar, sekitar 2 Milyar. (perlu dicek) dan juga paling banyak pungutan.
-



y. Sudah dilakukan koordinasi dengan Kepala sekolah, alasannya anak2 tersebut tinggal menumpang dengan Keluarga lain krn kebanyakan dari pedalaman, dan tidak ada asrama yang dapat menampung siswa2 tersebut. Dan berdampak pada kehadiran dalam kelas sangat kurang.

4. Kadis Pendidikan Kabupaten Mappi

- a. Pemberian Beasiswa yang bersumber dari Dana Otsus perlu dan Wajib dilakukan perekrutan, Dimana proses perekrutan dan seleksi dilakukan oleh Perguruan Tinggi tujuan.
 - b. Untuk pembiayaan proses seleksi dan perekrutan, seharusnya dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi
 - c. Hasil Seleksi pada Tingkat kabupaten selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk Pembiayaan beasiswa yang bersumber dari OTSUS
 - d. Perlu dilakukan Pemetaan terhadap Siswa OAP yang dipersiapkan untuk memperoleh Beasiswa DO baik dalam maupun Luar Negeri
 - e. Pemetaan Kompetensi Kebutuhan Kerja yang perlu diisi oleh Anak-anak OAP yang diberikan Beasiswa.
 - f. Tahun 2025: Kab Mappi menempatkan 483 orang untuk melanjutkan studi dengan Beasiswa dari Pemda Mappi.
 - g. Dana Otsus yang bersumber dari Provinsi sudah diselaraskan dengan Kab. Mappi untuk kebutuhan 500 mahasiswa. Langkah selanjutnya Adalah proses perekrutan.
 - h. Pendanaan yang akan disediakan oleh PPS sesuai dengan alokasi dan kewenangan.
 - i. Lakukan pemetaan kebutuhan kompetensi daerah, siswa berprestasi OAP yang akan dipersiapkan untuk memperoleh beasiswa dari masing-masing Kabupaten.
-



Rangkuman Permasalahan	: <ol style="list-style-type: none">1. Mengarahkan Baperida terkait dengan pengelolaan Dana OTSUS, karena ada indikasi perlakuan label Dana Otsus dihilangkan disamakan dengan sumber Dana Lain.2. Memberikan arahan keoada Baperida agar dalam Proses pendistribusian Dana Otsus Spesifik Grand (Yang sudah ditentukan) 30%, agar jangan sampai hanya $\frac{1}{2}$ dari Anggaran saja yang diberikan kepada dinas Pendidikan.3. Jumlah satuan pendidikan (SP) yang sudah berjalan ada 530 SP, ditambah Jumlah PAUD yang akan diusulkan sebanyak 531, berdampak pada Rasio Guru: Rombongan belajar (Rombel) yang tidak seimbang, Dimana Rombel > Jumlah Guru.4. Jumlah guru yang akan pensiun dalam 2 tahun ke depan berjumlah 218 guru.5. Dengan Juknis tahun 2025 tentang Dana BOS, menimbulkan maslah baru dari segi presentasi pembagian antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	: <ol style="list-style-type: none">1. Mengarahkan Baperida terkait dengan pengelolaan Dana OTSUS, karena ada indikasi perlakuan label Dana Otsus dihilangkan disamakan dengan sumber Dana Lain.2. Memberikan arahan kepada Baperida agar dalam Proses pendistribusian Dana Otsus Spesifik Grand (Yang sudah ditentukan) 30%, agar jangan sampai hanya $\frac{1}{2}$ dari Anggaran saja yang diberikan kepada dinas Pendidikan.3. Mengarahkan agar OPD terkait mengajukan analisis kebutuhan guru sesuai kebutuhan Jumlah satuan pendidikan (SP) yang sudah berjalan ada 530 SP, ditambah Jumlah PAUD yang akan diusulkan sebanyak 531, berdampak pada Rasio Guru: Rombongan belajar (Rombel) yang tidak seimbang, Dimana Rombel > Jumlah Guru.4. Mengarahkan agar OPD terkait mengajukan analisis kebutuhan guru berdasarkan Jumlah guru yang akan pensiun dalam 2 tahun ke depan berjumlah 218 guru.



5. Mengarahkan OPD terkait untuk melakukan evaluasi terhadap Juknis tahun 2025 tentang Dana BOS, menimbulkan masalah baru dari segi presentasi pembagian antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
6. BP3OKP menyelaraskan usulan Pemda dan melakukan koordinasi bersama KEMENPAN RB untuk segera membuka formasi ASN Guru untuk Provinsi Papua Selatan khususnya di 4 Kabupaten Wilayah PPS.

Dokumentasi :





Kegiatan 7	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
	Hari/Tgl: Selasa, 16 September 2025	
Lokasi Kegiatan	:	RSUD Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
Judul Kegiatan	:	Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke RSUD Merauke.
Misi/Keterangan	:	RIPPP – Papua Sehat.
Tugas dan Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam peningkatan layanan kesehatan.2. Melakukan Evaluasi lapangan terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Merauke.3. Menjalin Koordinasi lintas lembaga dalam mendukung peningkatan mutu layanan serta kesejahteraan tenaga medis
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">○ Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka○ Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri ESDM○ Pemerintah Provinsi Papua Selatan○ Pemerintah Kabupaten Merauke○ Direksi dan Tenaga Medis RSUD Merauke○ Pokja Papua Sehat○ Pasien dan keluarga Pasien
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam peningkatan layanan kesehatan.



2. Melakukan Evaluasi lapangan terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Merauke.

3. Menjalin Koordinasi lintas lembaga dalam mendukung peningkatan mutu layanan serta kesejahteraan tenaga medis.

-
- Hasil Kegiatan : 1. Wapres meninjau langsung pelayanan kesehatan di poliklinik RSUD Merauke, mengamati alur pelayanan dan kondisi fasilitas kesehatan.
2. Wapres menyapa serta berdialog dengan pasien dan keluarga yang sedang menjalani pemeriksaan maupun perawatan, memberikan semangat dalam proses penyembuhan.
3. Wapres berinteraksi dengan tenaga medis, dokter, dan perawat sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
4. Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
5. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis di Papua Selatan

-
- Rekomendasi : 1. Meningkatkan dukungan lintas kementerian/lembaga terhadap penguatan layanan kesehatan di RSUD Merauke sebagai rumah sakit rujukan di Papua Selatan.
2. Memastikan keberlanjutan program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai bagian dari implementasi misi Papua Sehat.



Dokumentasi :



Kegiatan 8		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Hari/Tgl: Rabu, 17 September 2025		
Lokasi Kegiatan	:	Gedung Keuangan Negara, Jayapura.
Judul Kegiatan	:	Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Bersama Anggota BP3OKP di Jayapura.
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP.
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">○ Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka○ Wakil Menteri Dalam Negeri○ Seluruh Anggota Badan Pengarah Papua (BP3OKP)
Tujuan Kegiatan	Pelaksanaan :	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat di Tanah Papua, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.2. Menyelaraskan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.3. Memperkuat sinergi antara Wakil Presiden RI sebagai Ketua Dewan Pengarah Papua dan BP3OKP



dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan Otonomi Khusus di wilayah Papua.

Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi Pemerintah Daerah dan BP3OKP: Dalam sesi dialog singkat, Wakil Presiden meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi erat dengan BP3OKP dalam setiap pelaksanaan program Otsus agar hasilnya terukur dan berkelanjutan. BP3OKP juga menyampaikan laporan singkat tentang hasil pengawasan dan tantangan pembangunan di wilayah pegunungan serta pesisir Papua.2. Arahan Wakil Presiden:<ul style="list-style-type: none">○ Menekankan pentingnya transparansi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).○ Mengingatkan agar program prioritas difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua (OAP).○ Mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.3. Sinergi Pusat dan Daerah: Kegiatan ini memperkuat hubungan antara BP3OKP, pemerintah daerah, dan instansi vertikal dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan dan menjamin keberlanjutan program nasional di Papua
Rekomendasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Sinergi dan Koordinasi: BP3OKP bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu membentuk tim koordinasi lapangan untuk memastikan seluruh program Otsus berjalan sesuai target2. Penguatan Sistem Monitoring Otsus: BP3OKP diharapkan menyusun mekanisme pemantauan dan



pelaporan terpadu guna memastikan setiap dana Otsus digunakan sesuai peruntukannya

3. Penguatan Sistem Monitoring Otsus: BP3OKP diharapkan menyusun mekanisme pemantauan dan pelaporan terpadu guna memastikan setiap dana Otsus digunakan sesuai peruntukannya.

Dokumentasi :



Kegiatan 9		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Hari/Tgl:		Rabu, 17 September 2025
Lokasi Kegiatan	:	Puskesmas Mopah Baru, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Judul Kegiatan	:	Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Puskesmas Mopah Baru.
Misi/Keterangan	:	RIPPP – Papua Sehat.
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan Harmonisasi kebijakan pelayanan kesehatan pusat dan daerah.• Melakukan Evaluasi lapangan terhadap implementasi program kesehatan masyarakat (CKG).• Memperkuat Koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan layanan kesehatan dasar dan penguatan peran tenaga medis di Papua Selatan
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka• Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa



- Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta C. H. Rahangiar
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Neville Muskita
- Forkopimda Papua Selatan dan Merauke
- Tenaga medis Puskesmas Mopah Baru
- Pasien dan keluarga pasien
- BP3OKP Papua Selatan (Pokja Papua Sehat)

Tujuan Pelaksanaan : Meninjau pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat di Kabupaten Merauke sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dasar di wilayah Papua Selatan.

Hasil Kegiatan :

1. Wapres Gibran meninjau pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Mopah Baru, yang memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia
2. Program CKG mencakup berbagai layanan, antara lain:
 - Pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan anak
 - Deteksi dini penyakit dan faktor risiko Kesehatan
 - Evaluasi risiko kardiovaskular
 - Skrining kesehatan jiwa
3. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh 73 tenaga kesehatan, terdiri atas:
 - 6 dokter umum
 - 3 dokter gigi
 - 12 bidan dan
 - 18 perawat
4. Wapres berdialog langsung dengan pasien dan tenaga medis, memberikan apresiasi atas dedikasi tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat
5. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas layanan kesehatan di Papua



Selatan melalui dukungan berkelanjutan bagi fasilitas dan tenaga kesehatan daerah

- Rekomendasi/Tindak Lanjut :
1. Memastikan keberlanjutan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai model layanan preventif di Papua Selatan.
 2. Mendorong peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah terpencil melalui dukungan lintas kementerian/Lembaga.
 3. Mengintegrasikan hasil evaluasi lapangan ke dalam agenda SHEK BP3OKP untuk memperkuat sinergi perencanaan bidang kesehatan antara pusat dan daerah.

Dokumentasi :



Kegiatan 10		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Hari/Tgl: Kamis, 18 September 2025		
Lokasi Kegiatan	:	Kantor BPK Provinsi Papua.
Judul Kegiatan	:	Sinergi dan kolaborasi di Kantor BPK Provinsi Papua.
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Kolaborasi, Sinkronisasi dan fungsi pengawasan BP3OKP tentang Pengawasan dana Otsus, DAK, DAU, APBN dan APBD di Provinsi Papua Selatan dan empat Kabupaten
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Kantor BPK Provinsi Papua beserta Jajarannya



• Anggota BP3OKP Papua Selatan

Tujuan Kegiatan	Pelaksanaan :	Membangun sinergitas dengan Kelembagaan dan Kementerian untuk berkolaborasi dan bersinergi membangun Papua secara khusus Provinsi Papua Selatan
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil audit temuan dari BPK dapat di share kepada BP3OKP untuk ditindaklanjuti dilakukan monitoring tentang penyelesaian temuan tersebut2. Hasil audit dari BPK berkaitan dengan penggunaan dana Otsus, DAK, DAU, APBN dan APBD di Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten monitoringnya dapat dilakukan oleh BP3OKP terhadap OPD-OPD terkait, sesuai dengan hasil temuan audit BPK3. Hasil audit dari BPK terhadap OPD-OPD yang merencanakan dan menggunakan dana otsus tidak tepat sasaran anak di monitor oleh BP3OKP Penyelesaian tentang audit itu
Rekomendasi/Tindak Lanjut	:	Sesuai saran dari BPK untuk mendapatkan data dari BPK disarankan BP3OKP harus menyurat terlebih dahulu agar mendapatkan data hasil audit temuan di Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten

Dokumentasi :





Kegiatan 11	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
	Hari/Tgl: Kamis, 18 September 2025	
Lokasi Kegiatan	:	Ruang Sidang Utama DPR Papua Selatan, Merauke.
Judul Kegiatan	:	Rapat Paripurna DPR Papua Selatan: Pembahasan dan Penetapan Raperdasus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Misi/Keterangan	:	RIPPP – Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan fungsi Evaluasi dan Koordinasi terkait akuntabilitas pelaksanaan APBD 2024.• Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi hasil audit BPK dengan perencanaan dan pelaksanaan program daerah.• Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas keuangan daerah sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">• DPR Papua Selatan (Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota)• Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan• Forkopimda Papua Selatan• Perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Papua Selatan• BP3OKP Papua Selatan (Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas)
Tujuan Kegiatan Pelaksanaan	:	Membahas dan menetapkan Raperdasus tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Rapat Paripurna membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang telah diaudit oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)2. DPR Papua Selatan memberikan apresiasi atas perbaikan pengelolaan keuangan daerah namun menyoroti beberapa catatan penting, antara lain:<ul style="list-style-type: none">o Ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan data pada laporan keuangan



- Rendahnya penyerapan belanja transfer ke kabupaten/kota
 - Rendahnya realisasi pendapatan daerah
 - Perbedaan penyebutan SILPA dan angka pembiayaan yang belum sinkron
3. Fraksi-fraksi DPR mendorong pemerintah provinsi segera menindaklanjuti temuan BPK dan memperkuat sistem pengawasan internal agar target opini WTP dapat tercapai pada tahun anggaran berikutnya
 4. Disoroti pula perlunya peningkatan belanja sektor layanan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, agar memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)
 5. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, memperbaiki data keuangan, dan menyusun rencana aksi (action plan) menanggapi rekomendasi BPK

Rekomendasi/Tindak Lanjut	:	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil audit BPK (LHP BPK 26 Mei 2025) dengan target peningkatan opini ke WTP2. Memperkuat koordinasi antara BPK, Inspektorat, dan OPD dalam proses rekonsiliasi data keuangan daerah3. Meningkatkan penyerapan belanja dan optimalisasi pendapatan daerah untuk menekan SILPA4. Memperbaiki validitas data program sosial dan pendidikan, termasuk beasiswa mahasiswa dan bantuan masyarakat5. Memastikan keterpaduan laporan keuangan dengan dokumen perencanaan daerah
---------------------------	---	---



Dokumentasi :



Kegiatan 12		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Hari/Tgl: Jumat, 19 September 2025		
Lokasi Kegiatan	:	Kantor BPKP Provinsi Papua.
Judul Kegiatan	:	Sinergi dan kolaborasi di Kantor BPKP Provinsi Papua.
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Diskusi masalah fungsi pengawasan dan penggunaan dana Otsus di Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Kantor BPKP Provinsi Papua beserta Jajarannya• Anggota BP3OKP Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membangun sinergitas dengan Kelembagaan dan Kementerian untuk berkolaborasi dan bersinergi membangun Papua secara khusus Provinsi Papua Selatan
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil audit temuan dari BPKP di share kepada BP3OKP untuk ditindaklanjuti dilakukan monitoring tentang penyelesaian temuan tersebut2. BP3OKP mengharapkan hasil pemeriksaan dan audit BPKP Provinsi Papua Dapat di share kepada BP3OKP untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan monitoring terhadap temuan-temuan itu
Rekomendasi/Tindak Lanjut	:	Sesuai saran dari BPKP untuk mendapatkan data dari BPKP disarankan BP3OKP harus menyurat terlebih dahulu agar



mendapatkan data hasil audit temuan di Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten.

Dokumentasi :

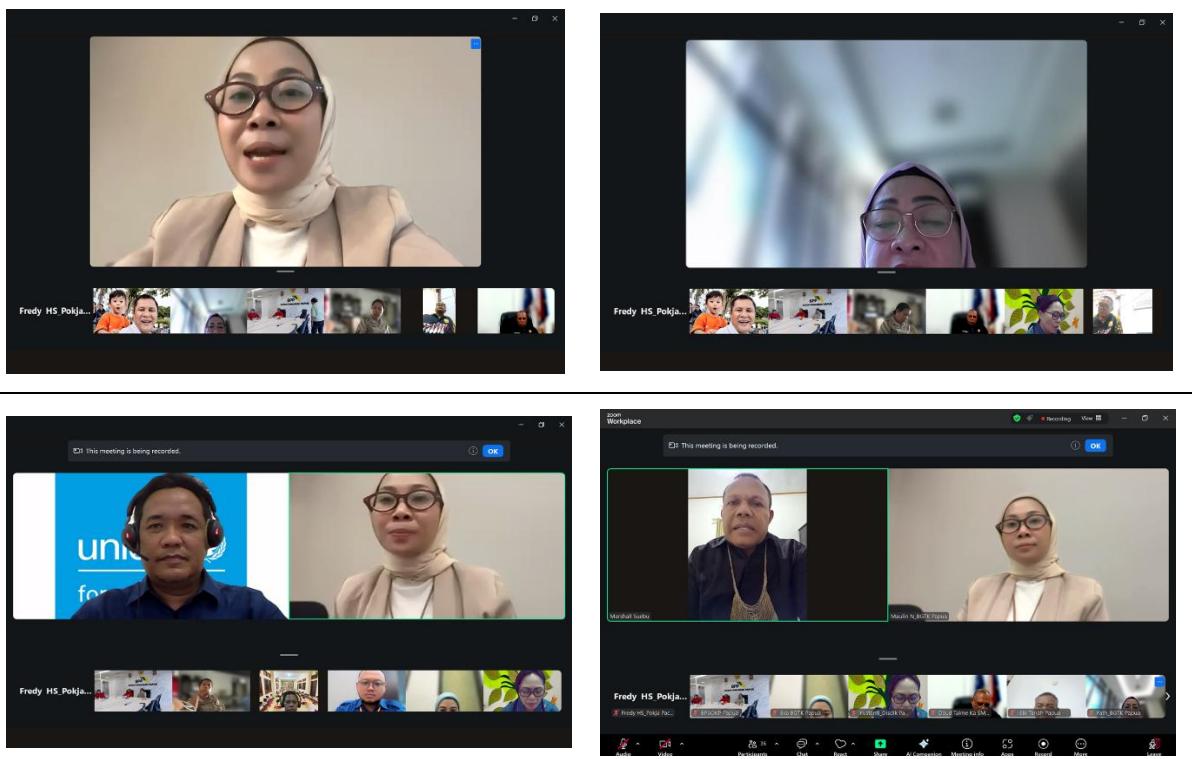


Kegiatan 13		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Dasar Kegiatan		Hari/Tgl: Jumat, 19 September 2025; 15.30 - SELESAI
Pelaksanaan Kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025 Undangan Zoom Workshop "Integration of Noken Into Curricula"
Lokasi Kegiatan	:	https://tinyurl.com/zoomkurikulumnoken Meeting ID: 543 360 1279 Passcode: bgtkpapua
Judul Kegiatan	:	Zoom Meeting Workshop “Integration Of Noken Into Curicula”
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas dan Papua Sehat
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi dan Koordinasi
Pelaksana Kegiatan	:	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI PAPUA. “Balai Guru Penggerak Papua”.



Peserta Kegiatan	:	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, BP3OKP, Balai Pelestarian dan Kebudayaan, Balai Bahasa dan Perguruan Tinggi sesuai Undangan
Tujuan Pelaksanaan	:	Kegiatan Upaya pelestarian Noken sebagai warisan budaya tak bendaIndonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO, serta mendorong integrasi nilai-nilai budaya ke dalam kurikulum
Hasil Kegiatan	:	Forum strategis untuk menyatukan pandangan, menggali aspirasi, dan merumuskan model kurikulum ko-kurikuler berbasis Noken yang aplikatif

Dokumentasi :



Kegiatan 14		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Hari/Tgl:		Senin, 22 September 2025
Lokasi Kegiatan	:	Kantor BP3OKP Papua Selatan, Merauke.
Judul Kegiatan	:	Pertemuan Koordinasi BP3OKP Papua Selatan dan Kodam dalam Rangka Rencana Kolaborasi Percepatan Pembangunan di Papua Selatan.



Misi/Keterangan	:	RIPPP – Papua Polhukam, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif
Tugas dan Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan Harmonisasi kerja sama lintas sektor antara BP3OKP dan TNI.• Mengidentifikasi kebutuhan kolaboratif dalam pembangunan dan penguatan layanan dasar di wilayah rawan dan terpencil• Menjalankan fungsi Koordinasi dan Evaluasi untuk menyusun langkah tindak lanjut menuju kerja sama formal melalui MOU/PKS
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Perwakilan Kodam XXIV/Mandala Trikora• Anggota BPP Provinsi Papua Selatan• Anggota Pokja Papua Sehat, Anggota pokja Papua Cerdas
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membangun sinergi dan membahas rencana kolaborasi antara BP3OKP Papua Selatan dan Kodam dalam mendukung percepatan pembangunan di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan di wilayah Papua Selatan
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. BP3OKP dan Kodam sepakat memperkuat kerja sama melalui rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) sebagai payung hukum kolaborasi2. Pembahasan mencakup peran Kodam dalam mendukung pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)3. Kodam menyatakan kesiapan menugaskan personel dan sumber daya logistik untuk membantu pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah4. Disepakati perlunya penempatan pos TNI di sekitar puskesmas rawan konflik sebagai upaya menjaga keberlangsungan layanan Kesehatan5. Diskusi juga membahas integrasi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan kegiatan BP3OKP dan pemerintah daerah agar pembangunan fisik dan sosial berjalan beriringan



6. Kedua pihak berkomitmen untuk menyusun rancangan teknis PKS sesuai bidang Pokja (Kesehatan, Pendidikan, dan Polhukam) serta melakukan sinkronisasi data lokasi prioritas Pembangunan

Rekomendasi/Tindak :
Lanjut

1. Menyusun draf awal MOU dan PKS antara BP3OKP dan Kodam sebagai dasar kolaborasi program
2. Melakukan pemetaan wilayah prioritas berbasis keamanan dan kebutuhan layanan dasar
3. Melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam forum bersama untuk memastikan dukungan pendanaan dan perencanaan daerah
4. Mengintegrasikan program TMMD ke dalam agenda kerja Pokja Papua Sehat dan Pokja Polhukam melalui mekanisme SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi).

Dokumentasi :



Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
Kegiatan 15	Hari/Tgl: Kamis, 25 September 2025
Lokasi Kegiatan	: Aula BPP Jalan Prajurit 1, Kompleks Kantor KPPN.
Judul Kegiatan	: Diskusi Bersama Forum Koordinasi dan Komunikasi Kontraktor OAP.



Misi/Keterangan	:	RIPPP – Papua Polhukam, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Anggota BPP Provinsi Papua Selatan• Anggota Pokja Papua Sehat, Anggota pokja Papua Cerdas• Anggota DPR• Kepala Balai Jalan Nasional• Kepala BAPPEDA Kabupaten Merauke• Perwakilan Kontraktor OAP Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Dengar Pendapat Konraktor OAP Provinsi Papua Selatan
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Regulasi perpres 17 tahun 2019 yang berkaitan dengan penjukan langsung (PL) pagu sebesar 2,5M untuk OAP dapat di dorong agar diperlakukan dengan baik untuk memberdayakan OAP2. Berharap BP3OKP mendorong untuk menetapkan regulasi tentang batasan kualifikasi dan persyaratan khusus kontraktor OAP3. Perlu adanya pelatihan dan bimbingan terkait penggunaan LPSE dan E-Katalog dalam pemenuhan keikutsertaan kontraktor OAP dalam lelang pekerja sesuai prosedur yang berlaku4. Keterlibatan Kontraktor OAP sebaiknya memperhatikan Perpres 17 tahun 2019 dan Inpres nomor 2 tahun 2025 sehingga dalam pelaksanaan OTSUS jilid 2 diharapkan regulasi ini wajib dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan dan stakeholders
Rekomendasi/Tindak Lanjut	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perlunya regulasi daerah/perdasus agar porsi pekerjaan bagi kontraktor OAP terakomodir dan diberikan ruang sebagai pelaku usaha sehingga diharapkan perputaran dana Otsus, DAU dan DAK tetap berada di lingkungan Wilayah Provinsi Papua Selatan



2. RIPP 2021-2041 dan RAPPP 2025-2030, diharapkan terjadi peningkatan investasi dan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kompetensi SDM kontraktor OAP untuk melakukan pekerjaan dibidang konstruksi dan pengadaan barang jasa sesuai dengan standar dan kualifikasi pekerjaan
4. Pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah kepada kontraktor OAP harus dikerjakan sendiri dan jangan diberikan kepada orang lain untuk menjaga kepercayaan dari pemerintah daerah

Dokumentasi :



2.2 Capaian

Berdasarkan Selama bulan September 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Selatan bersama Kelompok Kerja (Pokja) Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif telah melaksanakan delapan kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan koordinasi pusat–daerah, sinkronisasi program pembangunan, serta evaluasi implementasi kebijakan Otonomi Khusus di wilayah Papua Selatan. Adapun capaian hasil kinerja utama selama periode ini dirangkum sebagai berikut:



1. Penguatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Pembangunan

- Terjalin koordinasi intensif antara BP3OKP dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui kegiatan audiensi nasional di Jakarta (4 September 2025).
- Dihasilkan sejumlah usulan strategis, antara lain:
 - a. Pelaksanaan Rapat Pleno bersama Wakil Presiden RI untuk penyelarasan arah pembangunan Papua;
 - b. Usulan pembentukan *Program Promosi Perdamaian Papua* di tingkat internasional;
 - c. Pengusulan pendirian Sekolah Vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK) di Papua Selatan;
 - d. Penataan kelembagaan Lembaga Masyarakat Adat agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan.
- Meningkatnya koordinasi lintas sektor pusat–daerah untuk mendukung pembangunan lintas bidang (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan Polhukam).

2. Peningkatan Koordinasi Program Prioritas Daerah

- Dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Mappi (5 September 2025), telah dicapai kesepakatan penyelarasan program percepatan pembangunan 2026–2030 dengan **RPJMD Provinsi Papua Selatan** dan **RIPPP**.
- Pemerintah Provinsi menegaskan komitmen dukungan terhadap empat pilar utama pembangunan Kabupaten Mappi (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi).
- Rekomendasi tindak lanjut: optimalisasi pemanfaatan dana Otsus, APBD, dan DAK dalam mendukung program prioritas daerah.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP

- Melalui rapat koordinasi (9–10 September 2025) antara BP3OKP, Inspektorat, dan BPKP, ditemukan masih adanya saldo temuan audit tahun 2024 yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
- Disepakati pembentukan *forum koordinasi rutin* antara BP3OKP, Inspektorat, dan OPD untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi audit.



- Diperkuat komitmen untuk mengintegrasikan hasil audit ke dalam mekanisme SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi) BP3OKP.

4. Penguatan Sinergi Keamanan dan Pembangunan Daerah

- Kunjungan silaturahmi Pangdam XXIV/Mandala Trikora (11 September 2025) menghasilkan kesepakatan sinergi TNI–BP3OKP–Pemda dalam mendukung pembangunan aman dan damai di Papua Selatan.
- TNI menyatakan kesiapan membantu sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian melalui Babinsa dan Babinkamtibmas.
- Tersampaikan pula aspirasi pemberdayaan tenaga kerja Orang Asli Papua dalam proyek strategis nasional di Merauke.

5. Optimalisasi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan

- Dalam rapat SHEK penggunaan Dana Otsus (12 September 2025), teridentifikasi sejumlah isu krusial:
 - a. Ketidakseimbangan distribusi Dana Otsus 30% bidang pendidikan;
 - b. Kebutuhan mendesak untuk pemetaan kebutuhan guru dan pengajuan formasi ASN Guru baru di Kabupaten Mappi dikarenakan 218 guru akan pensiun dalam dua tahun ke depan;
 - c. Perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan beasiswa serta pemetaan kebutuhan kompetensi OAP penerima beasiswa.
- Hasil utama: rekomendasi BP3OKP agar Baperida dan OPD pendidikan menyesuaikan kebijakan Dana Otsus sesuai ketentuan, serta berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk pembukaan formasi guru.

6. Dukungan Pemerintah Pusat terhadap Penguatan Layanan Kesehatan

- Dalam kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke RSUD Merauke (16 September 2025), terkonfirmasi komitmen pemerintah pusat untuk peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan tenaga medis di Papua Selatan.
- BP3OKP melalui Pokja Papua Sehat turut memfasilitasi sinkronisasi kebijakan pusat–daerah di bidang kesehatan serta evaluasi fasilitas pelayanan kesehatan daerah.



7. Penguatan Koordinasi Nasional dan Evaluasi Otsus Papua

- Dalam kunjungan kerja Wakil Presiden RI bersama seluruh Anggota BP3OKP di Jayapura (17 September 2025), ditegaskan peran BP3OKP sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan Otsus.
- Wakil Presiden memberikan arahan agar pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan BP3OKP untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas program Otsus.
- Disampaikan pula laporan lapangan BP3OKP terkait tantangan pembangunan di wilayah pesisir dan pegunungan Papua.

8. Capaian Umum dan Dampak Kinerja

Secara keseluruhan, hasil kerja BP3OKP Papua Selatan selama bulan September 2025 menunjukkan:

- Meningkatnya efektivitas koordinasi pusat–daerah dalam bidang politik, pembangunan, pendidikan, dan kesehatan.
- Penguatan fungsi orkestrasi BP3OKP melalui forum SHEK, memperjelas peran lembaga sebagai penghubung strategis antara kebijakan nasional dan pelaksanaan daerah.
- Terbangunnya sinergi lintas sektor antara BP3OKP, TNI, Pemda, dan masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung pembangunan damai dan berkelanjutan.
- Peningkatan kesadaran akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Otsus, termasuk usulan reformasi distribusi, transparansi beasiswa, dan kebutuhan tenaga pendidik.
- Diperkuatnya komitmen pemerintah pusat terhadap peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan BP3OKP Papua Selatan selama bulan **September 2025** telah berjalan dengan baik dan menghasilkan sejumlah capaian strategis yang memperkuat fungsi lembaga sebagai pengarah, penghubung, dan pengawal kebijakan Otonomi Khusus di wilayah Papua Selatan.

Melalui delapan kegiatan utama, BP3OKP bersama Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif berhasil:

1. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga vertikal untuk memastikan sinkronisasi arah pembangunan.
2. Memperkuat pelaksanaan mekanisme Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam tata kelola program prioritas daerah.
3. Menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan TNI, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas, guna memastikan pembangunan berjalan aman, transparan, dan tepat sasaran.
4. Menghasilkan rekomendasi strategis terkait penguatan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
5. Mendapat dukungan konkret dari Pemerintah Pusat, melalui arahan langsung Wakil Presiden RI, terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar di Papua Selatan.

Dengan demikian, bulan September 2025 dapat dikatakan sebagai periode yang menandai **penguatan sinergi kelembagaan** serta **peningkatan efektivitas koordinasi pusat–daerah**, yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pelaksanaan Otsus Papua di wilayah Papua Selatan.



3.2 Rencana Tindak Lanjut Bulan Oktober 2025

Untuk menindaklanjuti capaian yang telah diperoleh, BP3OKP Papua Selatan merencanakan beberapa langkah strategis pada bulan berikutnya, antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rapat Pleno BP3OKP bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Papua Selatan, guna membahas tindak lanjut arahan Wakil Presiden RI.
2. Monitoring dan evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan Dana Otsus bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.
3. Pendampingan teknis Pokja Papua Produktif dalam perumusan program ekonomi berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, dan UMKM OAP).
4. Penyusunan laporan evaluasi tahapan akhir Triwulan III Tahun 2025 sebagai bahan rekomendasi kebijakan untuk BP3OKP Pusat.
5. Penguatan koordinasi kelembagaan dengan TNI/Polri, Inspektorat, dan BPKP untuk menindaklanjuti hasil audit dan memastikan integritas tata kelola pemerintahan daerah.

3.3 Penutup

BP3OKP Papua Selatan berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus secara transparan dan berkeadilan. Melalui kerja sama lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan percepatan pembangunan Papua Selatan dapat berjalan lebih efektif, berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, dan mencerminkan semangat “**Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera**”.

